



PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tertib arsip dan peningkatan pengelolaan arsip dinamis secara efektif dan efisien, perlu dilakukan pemberkasan dan penataan arsip dengan mengelompokkan arsip dalam satu kesatuan informasi yang utuh berdasarkan klasifikasi arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238);
7. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4. Kementerian Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian dalam melakukan pengelolaan Arsip Dinamis secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan sampai dengan penyusutan Arsip.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan fungsi yang meliputi:
  - a. fasilitatif; dan
  - b. substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Klasifikasi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penunjang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Klasifikasi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan operasional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan kode Klasifikasi Arsip yang berupa kombinasi huruf dan angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar:
  - a. penomoran naskah dinas;
  - b. pemberkasan Arsip;
  - c. penataan Arsip; dan
  - d. penyusutan Arsip.

Pasal 5

Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2024

MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

☞

M. IFTITAH S. SURYANAGARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☞

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

A. BENTUK DAN SUSUNAN

B. CARA PENGGUNAAN

BAB II KLASIFIKASI ARSIP

A. KODE KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

B. KODE KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

BAB III PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. BENTUK DAN SUSUNAN

1. Klasifikasi Arsip Kementerian Transmigrasi disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi/kegiatan Kementerian Transmigrasi.
2. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus dan dibagi menjadi 3 (tiga) perincian dasar. Perincian pertama, perincian kedua, dan perincian ketiga merupakan pola dasar yang berfungsi sebagai acuan dalam menentukan kode masalah yang tercantum dalam Pola Klasifikasi.
3. Untuk membedakan rincian pertama, kedua, dan ketiga dipergunakan kode huruf dan angka. Huruf adalah kode rincian pertama (masalah primer), angka pertama merupakan kode rincian kedua (masalah sekunder), dan angka kedua merupakan kode rincian ketiga (masalah tersier).

### B. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami Klasifikasi Arsip harus memahami rincian pertama, kedua, dan ketiga serta memahami hubungan antara masalah dengan sub masalah dan sub-sub masalahnya.
2. Tiap kode sub masalah dan sub-sub masalah merupakan rincian dari pokok masalah. Contoh:  
UMM : Kode rincian pertama/masalah primer Umum  
00 : Kode rincian kedua/masalah sekunder dari Kearsipan  
04 : Kode rincian ketiga/masalah tersier dari Layanan Arsip  
Dari contoh di atas dapat diartikan bahwa kode UMM.00.04 adalah naskah dinas yang berkenaan dengan Layanan Peminjaman dan Penggunaan Arsip mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.
3. Untuk dapat menentukan Kode Klasifikasi suatu arsip secara tepat harus dipahami masalah yang terkandung dan dari sudut pandang mana masalah itu disajikan.
4. Arsip yang mempunyai lebih dari satu masalah harus ditetapkan masalah yang lebih utama dikaitkan dengan tugas dan fungsi unit kerja yang mendayagunakan arsip.
5. Klasifikasi Arsip Kementerian Transmigrasi terdiri dari 14 (empat belas) pokok masalah, yang terdiri dari kegiatan Fasilitatif dan Substantif yang mencerminkan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja lingkup Kementerian Transmigrasi, yaitu:

#### KEGIATAN FASILITATIF (9 pokok masalah)

a. KEUANGAN	kode KEU
b. KEPEGAWAIAN	kode KPG
c. PERENCANAAN	kode PRC
d. HUKUM	kode HKM
e. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	kode OTL
f. UMUM	kode UMM
g. PENGADAAN BARANG DAN JASA	kode PBJ
h. HUMAS	kode HMS
i. PENGAWASAN	kode PWS

KEGIATAN SUBSTANTIF (5 pokok masalah)

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| a. | PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI             | kode PKT |
| b. | PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI | kode PET |
| c. | PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TRANSMIGRASI                         | kode SKT |
| d. | PUSAT DATA DAN INFORMASI TRANSMIRGASI                         | kode DIT |
| e. | PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TRANSMIGRASI           | kode PST |

BAB II  
KLASIFIKASI ARSIP

A. KODE KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

1. KEU KEUANGAN

- 00 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBN-P
  - 01 Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara
  - 02 Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian dengan Komisi DPR-RI
  - 03 Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI
  - 04 Ketetapan Pagu Definitif
  - 05 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
  - 06 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Termasuk Revisinya
- 01 Pelaksanaan Anggaran
  - 01 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian
  - 02 Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Masing-masing Satker
  - 03 Laporan Pelaksanaan Anggaran
- 02 Belanja
  - 01 Surat Penyedia Dana (SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GU)
  - 02 Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - 03 Pembukuan Anggaran
  - 04 Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal
  - 05 Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
- 03 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri
  - 01 Permohonan Pinjaman Luar Negeri (*Blue Book*)
  - 02 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (*Grey Book*)
  - 03 Dokumen *Memorandum Of Understanding* (MoU) dan Dokumen Sejenisnya
  - 04 Dokumen *Loan Agreement* (PHLN)
  - 05 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri
  - 06 Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN)
  - 07 Otorisasi Penarikan Dana (*Payment Advice*)
  - 08 Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri
  - 09 Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor (*Replenishment*)
  - 10 Laporan Kemajuan, Bulanan, dan Triwulan (*Report Progress, Monthly, dan Quarterly*)
  - 11 Laporan Penyelesaian/Laporan Tahunan (*Completion Report/Annual Report*)
  - 12 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kementerian
- 04 Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
  - 01 Keputusan Menteri tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan
  - 02 Keputusan Menteri tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang/Jasa termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan

- 03 Keputusan Menteri tentang Penetapan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan
- 04 Keputusan Menteri tentang Penetapan Pengelola Barang termasuk Berita Acara Serah Terima Barang
- 05 Keputusan Penetapan Pengelola Keuangan Kementerian/ Unit Kerja
- 06 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Bendahara Pembantu termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan
- 05 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
  - 01 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
  - 02 Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Perintah Membayar (SPM)
  - 03 Laporan Realisasi Bulanan SAI/Triwulan/ Semester
- 06 Pertanggungjawaban Keuangan Negara
  - 01 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
  - 02 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat Jenderal
  - 03 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional  
Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan aparat pemeriksa fungsional seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP), dan Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP.
  - 04 Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara  
Naskah dinas yang berhubungan dengan penyelesaian kerugian keuangan negara, termasuk di dalamnya Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
  - 05 Gagal Bayar
- 07 Akuntansi dan Pelaporan
  - 01 Verifikasi dan Pembukuan Keuangan
  - 02 Akuntansi dan pelaporan keuangan (triwulan, semester, dan Tahunan)
- 08 Perbendaharaan dan penatausahaan keuangan
  - 01 Daftar Gaji, Lembur dan Uang Makan
  - 02 Kartu Gaji
  - 03 Surat Setoran Pajak (SSP)
  - 04 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
  - 05 Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)
  - 06 Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank
  - 07 Laporan Kas
  - 08 Piutang
  - 09 Hutang
- 09 Barang Milik Negara (BMN)
  - 01 Rencana Kebutuhan BMN
  - 02 Inventarisasi BMN
  - 03 Pengelolaan BMN
  - 04 Penghapusan/hibah BMN
  - 05 Berita Acara Serah Terima BMN

- 06 Laporan BMN
- 07 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi BMN
- 08 Surat Teguran Kelalaian Pemanfaatan BMN
- 10 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  - 01 Usulan Tarif PNBP  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penetapan tarif PNBP baik ke Kementerian Keuangan maupun internal
  - 02 Kontrak/Perjanjian Sewa PNBP
  - 03 Penagihan/Pengembalian PNBP
  - 04 Prosedur Pengelolaan dan Pelaporan PNBP
  - 05 Keringanan/Keberatan Pembayaran PNBP
  - 06 Pemeriksaan dan Pengawasan PNBP
  - 07 Sanksi/Denda PNBP

2. KPG KEPEGAWAIAN

- 00 Formasi Pegawai
  - 01 Usulan dari Unit Kerja
  - 02 Usulan Permintaan Formasi kepada MenPan RB dan Kepala BKN
  - 03 Persetujuan MenPan dan RB
  - 04 Penetapan Formasi PNS
  - 05 Penetapan Formasi Khusus
- 01 Penerimaan/Pengadaan Pegawai Negeri
  - 01 Proses Penerimaan Pegawai  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta *test*, pelaksanaan ujian tertulis, keputusan hasil ujian dan wawancara.
  - 02 Penetapan Pengumuman Kelulusan
  - 03 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
  - 04 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP  
Naskah dinas yang meliputi surat lamaran, ijazah, SKCK, kartu kuning dan surat keterangan kesehatan.
  - 05 Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dari 2 (dua) Tahun
  - 06 Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif
- 02 Pembinaan Karir Pegawai
  - 01 Diklat/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai  
Naskah dinas yang berkaitan dengan surat perintah/surat tugas/surat keputusan/surat izin dan laporan kegiatan pengembangan diri.
  - 02 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat
  - 03 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Standar Kinerja Pegawai (SKP)
  - 04 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
  - 05 Berkas Disiplin Pegawai  
Naskah dinas yang meliputi daftar hadir, rekapitulasinya dan hukuman disiplin.
  - 06 Penghargaan dan Tanda Jasa
  - 07 Satyalencana Karya Satya
  - 08 Pengembangan karir
- 03 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai
- 04 Mutasi Pegawai

- 01 Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar-Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar-Unit
- 02 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
- 03 Mutasi Keluarga
- 04 Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
- 05 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Fungsional (umum dan tertentu)
- 06 Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
- 07 Peninjauan Masa Kerja
- 08 Berkas Baperjakat
- 09 Pelantikan Jabatan
- 05 Administrasi Pegawai
  - 01 Cuti Besar
  - 02 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan
  - 03 Cuti Alasan Penting
  - 04 Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
  - 05 Dokumentasi Identitas Pegawai  
Naskah dinas yang berkaitan usul penetapan karpeg/KPE/karis/karsu, keanggotaan organisasi profesi/kedinasan, laporan pajak penghasilan pribadi (LP2P) dan keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai (KP4).
  - 06 Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
  - 07 Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala
  - 08 Berkas Pengurusan Tunjangan Jabatan
  - 09 Berkas Pengurusan Tunjangan Kinerja
  - 10 Sistem Informasi Kepegawaian
  - 11 Pernyataan tidak sedang menjalani proses atau pernah pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
  - 12 Keterangan Kerja
  - 13 Data Pegawai
- 06 Kesejahteraan Pegawai
  - 01 Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
  - 02 Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS
  - 03 Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan
  - 04 Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial
  - 05 Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas
  - 06 Berkas tentang Layanan Pegawai yang Meninggal karena Dinas
  - 07 Berkas tentang Pemberian Tali Kasih
  - 08 Berkas tentang Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa
  - 09 Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi
  - 10 Berkas tentang Perayaan Hari Besar Nasional/Keagamaan
  - 11 Berkas tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
- 07 Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun
- 08 Perselisihan/Sengketa Pegawai
- 09 Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/Dudanya dan PNS Yang Meninggal
- 10 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil

- 01 Berkas Lamaran yang Diterima
- 02 Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya
- 03 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
- 04 S.K. Pengangkatan CPNS
- 05 Hasil Pengujian Kesehatan
- 06 S.K. Pengangkatan PNS
- 07 S.K. Peninjauan Masa Kerja
- 08 S.K. Kenaikan Pangkat
- 09 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan
- 10 S.K. Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Fungsional (umum dan tertentu)
- 11 S.K. Perpindahan Wilayah Kerja
- 12 S.K. Perpindahan antar-Instansi
- 13 S.K. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
- 14 Berita Acara Pemeriksaan
- 15 S.K. Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS
- 16 S.K. Perbantuan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk
- 17 S.K. Penarikan Kembali dari Perbantuan/ Dipekerjakan
- 18 S.K. Pemberian Uang Tunggu
- 19 S.K. Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara
- 20 S.K. Pengalihan PNS
- 21 S.K. Pemberhentian sebagai PNS
- 22 S.K. Pemberhentian Sementara
- 23 Surat Keterangan Pernyataan Hilang
- 24 Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang
- 25 S.K. Penggantian Nama
- 26 Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran
- 27 Akta Nikah/Cerai
- 28 Akta Kelahiran
- 29 Isian Formulir PUPNS
- 30 Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan
- 31 Surat Permohonan Menjadi Anggota Partai Politik
- 32 Surat Keterangan Mutasi Keluarga
- 33 Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang
- 34 Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan
- 35 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
- 36 Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus
- 37 Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
- 38 Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri
- 39 Surat Izin Berpergian ke Luar Negeri
- 40 Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS
- 41 Ijasah/Sertifikat
- 42 S.K. Penempatan/Penarikan Pegawai
- 43 S.K. Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk
- 44 Surat Pertimbangan Status PNS
- 45 S.K. Pengaktifan Kembali Sebagai PNS
- 46 Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah
- 47 S.K. Pensiun
- 48 Surat Pernyataan Bebas Hutang Piutang

- 11 Berkas Perseorangan Pejabat Negara
  - 12 Pegawai Kontrak
    - 01 Proses Penerimaan Pegawai Kontrak  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pengumuman penerimaan, pengumuman seleksi administrasi, pengumuman wawancara, pengumuman akhir penerimaan dan berita acara pelaksanaan penerimaan Pegawai Kontrak.
    - 02 Kontrak/Perjanjian Kerja Pegawai Kontrak
    - 03 Berkas Perseorangan Pegawai Kontrak  
Naskah dinas yang berkaitan dengan personal *file* Pegawai Kontrak.
    - 04 Pemberhentian Pegawai Kontrak
    - 05 Pengalaman Kerja
  - 13 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
    - 01 Proses Penerimaan
    - 02 Berkas Perseorangan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
3. PRC PERENCANAAN
- 00 Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
    - 01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang/*master plan*
    - 02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/Rencana Strategis (Renstra)
    - 03 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
  - 01 Program Kerja Tahunan
    - 01 Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung
    - 02 Program Kerja Tahunan Unit Kerja
    - 03 Program Kerja Tahunan Lembaga/Instansi
  - 02 Penetapan/Kontrak Kinerja
    - 01 Menteri
    - 02 Pimpinan Unit Kerja
  - 03 Laporan
    - 01 Laporan Berkala
    - 02 LAKIP
    - 03 Laporan Insidental
  - 04 Evaluasi Program
    - 01 Evaluasi Program Unit Kerja
    - 02 Evaluasi Program Kementerian
4. HKM HUKUM
- 00 Program Legislasi
    - 01 Bahan/Materi Program Legislasi Nasional dari Kementerian
    - 02 Program Legislasi Kementerian
  - 01 Rancangan Peraturan Perundang-undangan
    - 01 Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
    - 02 Rancangan Peraturan Pemerintah
    - 03 Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden
  - 02 Peraturan Menteri  
Naskah dinas yang berkaitan dengan peraturan Menteri sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi peraturan.

- 03 Keputusan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan keputusan sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi keputusan.
  - 01 Keputusan Menteri
  - 02 Keputusan Pejabat Setingkat Eselon I
- 04 Instruksi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan instruksi sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi instruksi.
  - 01 Instruksi Menteri
  - 02 Instruksi Pejabat Setingkat Eselon I
- 05 Surat Perintah  
Naskah dinas yang berkaitan dengan surat perintah sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi peraturan.
  - 01 Surat Perintah Menteri
  - 02 Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon I dan Eselon II
- 06 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang Bersifat Nasional/Regional/Internasional  
Naskah dinas yang berkaitan dengan standar/pedoman/prosedur kerja yang menunjang kinerja pegawai di lingkungan Kementerian maupun masyarakat umum.
- 07 Nota Kesepahaman (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama  
Naskah dinas yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama/*Memorandum of Understanding* (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama/*Letter of Intens* (LoI) baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.
  - 01 Dalam Negeri
  - 02 Luar Negeri
- 08 Dokumentasi Hukum
- 09 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
  - 01 Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/Pembinaan Hukum
  - 02 Laporan Hasil Pelaksanaan
- 10 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi
- 11 Kasus/Sengketa Hukum
  - 01 Pidana
  - 02 Perdata
  - 03 Tata Usaha Negara
- 12 Perizinan
- 13 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
  - 01 Hak Cipta
  - 02 Hak Paten
  - 03 Hak Merk
- 14 Penghargaan Kelembagaan
- 15 Permohonan Hak yang Ditolak
  - 01 Materi Rancangan Produk Hukum dan Unit Kerja Operasional
  - 02 Proses Pembahasan Materi Produk Hukum di Tingkat Biro
  - 03 Proses Pembahasan Materi Tingkat antar-Kementerian/Lembaga (Lintas Sektor)
- 16 Surat Edaran  
Naskah dinas yang berkaitan dengan surat edaran sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi surat edaran
  - 01 Surat Edaran Menteri
  - 02 Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon I dan Eselon II

5. OTL ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
  - 00 Struktur Organisasi Kementerian
    - 01 Pembentukan
    - 02 Perubahan
    - 03 Pembubaran
  - 01 Uraian Jabatan dan Tata Kerja
  - 02 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional
  - 03 Evaluasi Kementerian
  - 04 Analisa Jabatan
  - 05 Ketatalaksanaan/Standar Operasional Prosedur (SOP)
  - 06 Bisnis Proses
  - 07 Reformasi Birokrasi
    - 01 Agen Perubahan
    - 02 Zona Integritas
    - 03 Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
  
6. UMM UMUM
  - 00 Kearsipan
    - 01 Administrasi Persuratan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan urusan surat-menyurat yang terdiri atas pemberitahuan pindah kantor, penambahan nomor telepon, alamat pejabat, spesimen tanda tangan pejabat, cap dinas, stempel draf, penomoran naskah dinas, pengiriman, ekspedisi, dan penyimpanan.
    - 02 Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan ketatalaksanaan, pengolahan, penyimpanan, analisis nilai guna, pemindahan, perawatan, penyerahan, penyusutan, pemusnahan, dan konservasi, pelacakan arsip, serta penyelamatan arsip vital.
    - 03 Persetujuan Jadwal Retensi Arsip
    - 04 Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)  
Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan jasa kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.
    - 05 Penyusutan Kearsipan
    - 06 Pembinaan Kearsipan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.
    - 07 Risalah/Notula Rapat
    - 08 Audit Kearsipan Eksternal
    - 09 Audit Kearsipan Internal
  - 01 Kerumahtanggaan
    - 01 Pendistribusian
    - 02 Telekomunikasi
    - 03 Administrasi Penggunaan Fasilitas  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, wisma, rumah dinas, kendaraan, dan fasilitas kantor lainnya.
    - 04 Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi
    - 05 Pengurusan Kendaraan Dinas
    - 06 Pemeliharaan Gedung dan Taman

- 07 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, Televisi, Kabel, dan Komputer  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan jaringan listrik, air, telepon, televisi, kabel, dan komputer.
- 08 Ketertiban dan Keamanan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan masalah pengamanan dan ketertiban kantor serta rumah dinas.
- 09 Administrasi Pengelolaan Parkir
- 10 Administrasi Pakaian Dinas Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya
- 11 Pelayanan Kesehatan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan/poliklinik
- 02 Keprotokolanan
  - 01 Penyelenggaraan Acara Kedinasan
  - 02 Buku Tamu
  - 03 Agenda Kegiatan Pimpinan (Menteri, Wakil Menteri, dan Eselon I)
  - 04 Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri
  - 05 Kunjungan Dinas Eksternal/Audiensi
  - 06 Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat
- 7. PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA
  - 00 Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
    - 01 Standarisasi Pengadaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan standardisasi pengadaan termasuk SDM, dokumen, peraturan pengadaan barang/jasa, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sarana prasarana pengadaan.
    - 02 Rencana Umum Pengadaan  
Naskah dinas yang berkenaan dengan kegiatan identifikasi dan analisa kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penerapan rencana penganggaran pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, pengumuman rencana pengadaan.
    - 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan  
Naskah dinas yang berkenaan dengan sertifikasi, bimbingan teknis, pelatihan dan layanan advokasi pengadaan.
    - 04 Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sanggah  
Naskah dinas yang berkenaan dengan kegiatan penanganan permasalahan kontrak, Jasa, barang dan konstruksi dan keterangan ahli terkait pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi.
    - 05 Layanan Pengelolaan Pengadaan  
Naskah dinas yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengelola pengadaan dan manajemen pengadaan.
    - 06 Pengadaan Barang
    - 07 Pengadaan Konstruksi
    - 08 Pengadaan Jasa Konsultasi
    - 09 Pengadaan Jasa Lainnya

- 01 Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - 01 Pengadaan Secara Elektronik  
Naskah dinas yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui penyedia (dari proses persiapan pengumuman pengadaan, pengumuman pengadaan, penawaran sampai dengan penetapan pemenang) untuk pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.
  - 02 Naskah dinas yang berkaitan dengan sistem monitoring dan evaluasi pengadaan.
  - 03 Pengadaan Barang
  - 04 Pengadaan Konstruksi
  - 05 Pengadaan Jasa Konsultasi
  - 06 Pengadaan Jasa Lainnya
  
8. HMS HUMAS
  - 00 Dokumentasi/Liputan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/fakta kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing dalam berbagai media meliputi kertas, foto, video, rekaman suara, multimedia serta tukar-menukar dokumentasi.
  - 01 Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi Kelembagaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan publikasi/penyebarluasan informasi seperti publikasi media elektronik, media cetak, naskah berita, poster, *bulletin*, *leaflet*, *booklet*, brosur, dan kliping.
    - 01 Kliping Koran
    - 02 Brosur/*Leaflet*/poster/Plakat
    - 03 Pengumuman/Pemberitaan
    - 04 Pengaduan Masyarakat
  - 02 Hubungan antar-Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi
    - 01 Hubungan antar-Lembaga Pemerintah  
Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama lembaga pemerintah/antar-kementerian
    - 02 Hubungan Organisasi Sosial/ LSM  
Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama organisasi sosial, kemasyarakatan atau LSM
    - 03 Hubungan dengan Perusahaan
    - 04 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)  
Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama lembaga pendidikan dan perguruan tinggi
    - 05 Forum Kehumasan
    - 06 Hubungan Media Massa  
Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama media massa (siara pers, konferensi pers, kunjungan wartawan/peliputan), pendapat umum serta pengaduan masyarakat

- 03 Rapat Kerja/Dengar Pendapat/*Hearing* DPR  
Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama DPR RI (dengar pendapat/*hearing*).
- 04 Bahan/Materi Pidato/Sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet, DPRD, Muspida Provinsi/Kabupaten/Kota
- 05 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal
- 06 Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi dan laporan.
- 07 Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan
- 08 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, dan Bela Sungkawa
- 09 Pidato/Sambutan Pimpinan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan bahan/materi pidato Pimpinan.
  - 01 Menteri
  - 02 Wakil Menteri
  - 03 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
- 10 Kepustakaan
  - 01 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka
  - 02 Pengadaan dan Pengolahan Bahan
  - 03 Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
  - 04 Preservasi Bahan Pustaka

9. PWS PENGAWASAN

- 00 Rencana Pengawasan
  - 01 Rencana Strategis Pengawasan
  - 02 Rencana Kerja Tahunan
  - 03 Rencana Kinerja Tahunan
  - 04 Penetapan Kinerja Tahunan
  - 05 Rakor Pengawasan Tingkat Nasional
- 01 Pedoman Kebijakan Pengawasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan sampai dengan penetapannya.
- 02 Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan sampai dengan penetapannya.
- 03 Audit  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan audit sejak dalam rancangan sampai dengan menjadi catatan dan laporan.
  - 01 Audit Kinerja
  - 02 Audit dengan tujuan tertentu
  - 03 Audit Investigasi
  - 04 *Monthly Audit*
  - 05 Audit Lainnya
- 04 Reviu  
Naskah dinas yang berkaitan dengan reviu sejak dalam rancangan sampai dengan menjadi catatan dan laporan.
  - 01 Reviu laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan
  - 02 Reviu laporan kinerja

- 03 Reviu RKA-KL
- 04 Reviu revisi DIPA/Anggaran
- 05 PIPK
- 06 RKBMN
- 05 Evaluasi  
Naskah Dinas yang berkaitan dengan evaluasi yang dilaksanakan dilingkup kementerian.
  - 01 SAKIP
  - 02 PMPRB
  - 03 SPIP
- 06 Pemantauan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan hasil pengawasan
  - 01 Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan
  - 02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan
  - 03 Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal
  - 04 Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal
  - 05 Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Internal
  - 06 Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Eksternal
  - 07 Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
  - 08 Tuntutan Perbendaharaan  
naskah yang berkaitan dengan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi tuntutan perbendaharaan (TPI)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR), seperti: Laporan Kehilangan, Berita Acara Kehilangan Barang/Uang, SK Tanggung Jawab Mutlak/Surat Kesanggupan untuk mengganti ke kas Negara, SK Penghapusan Uang dan Barang sampai laporan penyelesaian TP/TGR.
- 07 Pelaksanaan Pengawasan
  - 01 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut (TL)
  - 02 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut (TL)
  - 03 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
  - 04 Laporan Pemutakhiran Data
  - 05 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
  - 06 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Kementerian
  - 07 *Good Governance*
- 08 Pengawasan Lainnya  
Naskah dinas yang berkaitan dengan bimbingan teknis, sosialisasi pengawasan, konsultasi pengawasan, koordinasi pengawasan, Pelatihan dikantor sendiri (PKS), meliputi surat penugasan, surat menyurat beserta laporan.

- 09 Penerapan *Early Warning System*  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada Unit Kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan
- 10 Penerapan *Internal Audit Capability Model* (IACM)  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan.
- 11 Surat Keterangan/Pernyataan Bebas Temuan
- 12 Temuan Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindak Lanjuti
- 13 Penerapan Peta Risiko Pengawasan/Manajemen Risiko  
Naskah dinas yang berkaitan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pemetaan Risiko/Pengelolaan Risiko.
- 14 Piagam Pengawasan
- 15 Pemeriksaan Khusus  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan khusus tentang penyelesaian kasus-kasus yang merugikan negara.
- 16 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
  - 01 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Perlu Ditindaklanjuti  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khusus yang perlu ditindaklanjuti.
  - 02 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Tidak Perlu Ditindaklanjuti  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khusus yang tidak perlu ditindaklanjuti.
- 17 Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 18 Satuan Pengawasan Intern (SPI)/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Satuan Pengawasan Intern (SPI)/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 19 Hasil Analisis Laporan dan Evaluasi Pengawasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah dan laporan pengawasan lainnya, serta penyusunan hasil analisis dan evaluasi.
- 20 Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)  
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK).
- 21 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  
Naskah dinas yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

B. KODE KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

1. PKT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

00 Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

01 Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana Kawasan transmigrasi.

02 Penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan pengembangan dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan baru

Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana rinci satuan Kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru.

03 Fasilitasi Legalisasi Tanah

Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi legalisasi tanah.

04 Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan

Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.

05 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

01 Pembangunan Kawasan Transmigrasi

01 Pembangunan Satuan Permukiman

Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan satuan permukiman.

- 02 Pembangunan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan.
  - 03 Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan kawasan perkotaan baru.
  - 04 Evaluasi Kelayakan Permukiman dan Perwujudan Ruang Kawasan Transmigrasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi.
- 02 Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi
    - 01 Penyiapan Calon Transmigran  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan calon transmigran.
    - 02 Mediasi Kerja Sama Antar-Daerah dan Persiapan Perpindahan Transmigran  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran.
    - 03 Pelayanan Perpindahan dan Penempatan Transmigran  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran.
    - 04 Penataan Penduduk Setempat  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan penduduk setempat.

- 05 Konsolidasi dan Adaptasi Lingkungan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang konsolidasi dan adaptasi lingkungan.
- 03 Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
  - 01 Pengembangan Sosial Budaya dan Mental Spiritual  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual.
  - 02 Pengembangan Usaha dan Kelembagaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan.
  - 03 Pengembangan Prasarana dan Sarana dan Pengelolaan Lingkungan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan.
  - 04 Fasilitasi Pengurusan Hak Atas Tanah  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengurusan hak atas tanah.
  - 05 Advokasi Pertanahan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi pertanahan.
- 04 Pengembangan Kawasan Transmigrasi
  - 01 Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi.

- 02 Pengembangan Konektivitas Intra dan Antar-Satuan Kawasan Pengembangan dan Antar-Kawasan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan.
- 03 Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Kawasan Transmigrasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan kawasan transmigrasi.
- 04 Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi.
- 05 Pengelolaan Aset Kawasan Transmigrasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aset kawasan transmigrasi.

## 2. PET PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI

- 00 Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
  - 01 Perencanaan Teknis Pengembangan Kelembagaan Ekonomi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi.
  - 02 Pelayanan Investasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan investasi.

- 03 Fasilitasi Pengembangan Investasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan investasi.
  - 04 Perencanaan Teknis Pengembangan dan Hilirisasi Produk Unggulan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan dan hilirisasi produk unggulan.
  - 05 Perencanaan Teknis Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan.
  - 06 Perencanaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
- 01 Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi
    - 01 Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat.
    - 02 Pengembangan Kelembagaan Investasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan investasi.
    - 03 Pengembangan Kewirausahaan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kewirausahaan.

- 02 Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi
  - 01 Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk unggulan.
  - 02 Pengembangan Prasarana dan Sarana Produksi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana produksi.
  - 03 Pengembangan Teknologi dan Hilirisasi Produk Unggulan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi dan hilirisasi produk unggulan.
  - 04 Pengembangan Rantai Pasok dan Rantai Nilai Produk Unggulan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan.
  - 05 Pengembangan Pembiayaan Produk Unggulan Transmigrasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pembiayaan produk unggulan transmigrasi.
- 03 Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi
  - 01 Pengembangan Strategi Pemasaran  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan strategi pemasaran.
  - 02 Pengembangan Jaringan dan Kerja Sama Pemasaran  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran.

- 03 Pengembangan Promosi Kawasan dan Produk Unggulan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan.
- 04 Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemasaran produk unggulan.
- 05 Pelayanan Informasi Potensi Investasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi potensi investasi.
- 06 Pelayanan Perijinan dan Fasilitasi Akses Permodalan  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perijinan dan fasilitasi akses permodalan.
- 04 Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
  - 01 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Transmigrasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat transmigrasi.
  - 02 Fasilitasi Tenaga Pendamping Kawasan Transmigrasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi tenaga pendamping kawasan transmigrasi.
  - 03 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi.

3. SKT PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TRANSMIGRASI

01 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi  
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan, pelaksanaan pengembangan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

02 Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan, pelaksanaan pengembangan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

4. DIT PUSAT DATA DAN INFORMASI TRANSMIGRASI

01 Pengembangan Sistem Informasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan, pelaksanaan pengembangan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi.

02 Pengelolaan Teknologi Informasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan, pelaksanaan pengembangan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan teknologi informasi.

03 Pengelolaan Data dan Informasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan, pelaksanaan pengembangan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi.

04 Pengembangan Kerja Sama Data dan Informasi Ketrasmigrasian

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan, pelaksanaan pengembangan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama data dan informasi ketrasmigrasian.

5. PST PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TRANSMIGRASI

01 Pelatihan

Naskah dinas yang berkaitan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan.

02 Pengembangan Kelembagaan Pelatihan

Naskah dinas yang berkaitan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan pelatihan.

- 03 Pengembangan Tenaga Pelatihan  
Naskah dinas yang berkaitan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan tenaga pelatihan.
- 04 Pengembangan Kompetensi  
Naskah dinas yang berkaitan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi.
- 05 Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Sumber Daya Manusia Transmigrasi  
Naskah dinas yang berkaitan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan aparatur sipil negara dan sumber daya manusia transmigrasi.

BAB III  
PENUTUP

Demikian Peraturan Menteri ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Transmigrasi.

MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH S. SURYANAGARA